

# DINAMIKA PEMANFAATAN RUANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

## *Dynamics Space Exploitation Based on Local Wisdom in Buleleng Regency, Bali Province*

I Gede Astra Wesnawa

Jurusan Pendidikan Geografi FIS Undiksha Jl. Udayana Kampus Tengah Singaraja  
Telp. (0362)23884. E-mail: [gede\\_astrawesnawa@yahoo.co.id](mailto:gede_astrawesnawa@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*This Research is carried out in urban area and countryside of Buleleng regency, Generally, the aim of this study is to analyze the dynamic space exploitation based on local wisdom. Particularly, this research aims to: (1) analyze the difference of applying of local wise aspect in exploiting of regional room of countryside and lawn of custom society house in urban area and countryside, and factors that cause the difference of its applying and (2) solution of using custom countryside room and lawn of custom society house in urban area and countryside based on local wisdom. To reach the target designed research by using survey device, by using household as analysis unit. Household Sample is determined by proportional sampling random (145 sample). Data are collected through documentation technique, and interview of questioner. Then the data analyzed are through technique analyze qualitative. Research result out find differences of local wisdom applying in exploiting of regional room of countryside and lawn of house, and solution in exploiting of room base on local wisdom concept as materialization of human being interaction process with environment. Based on the research result, contribution that can be put forward: (1) contribution of theory: approach of countryside scale spatial and house made excellence of this research to express the difference of local wise applying in exploiting of regional room of countryside and lawn of house and (2) practical contribution: exploiting of room based on local wisdom can survive and sustain to influence modernize if custom society remains to tie with custom countryside. The concept of Tri Hita Karana as form of local wisdom form in utilizing adaptive room against change and growth of an era which is indicated with being compromise on Kahyangan Tiga as a soul of dwelling, territorial area as a village physical form and people who dwell there. This harmonious relation guarantee harmonious preserving environment.*

**Key words:** *Dynamics, Exploiting of pace, Local Wisdom*

### **PENDAHULUAN**

Penelitian ini dianalisis berdasarkan disiplin ilmu geografi dengan menggunakan pendekatan keruangan (*spatial approach*). Memperhatikan pandangan geografi mutakhir yang bersifat integratif dengan memahami pula pengertian ruang, maka ruang merupakan

salah satu kajian utama dalam geografi (Worosuprodjo, 2001). Pendekatan keruangan merupakan salah satu pendekatan utama geografi, analisisnya menekankan pada eksistensi ruang yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia (Yunus, 2004). Adapun operasionalisasi penelitian ini menekankan pada tema analisis: *spatial*

*pattern analysis, spatial structure analysis dan spatial comparison analysis.*

Penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992. Setiawan (2006) menyatakan manfaat penataan ruang yaitu menjamin kepentingan publik, sekaligus individu; efisiensi sumber daya; konservasi lingkungan dan budaya; mengurangi konflik pemanfaatan ruang; mengurangi ketimpangan spasial; dan menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah. Sesuai dengan Undang-undang 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara hierarkis menurut kewenangan administratif, yaitu dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRW disusun dengan memperhatikan wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah provinsi, termasuk di dalamnya penerapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya (Muta'ali, 2005).

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan wilayah lainnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pengembangan wilayah dan penataan ruang. Komitmen Pemerintah Daerah Bali dalam penataan ruang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Landasan pembangunan Bali yang berwawasan budaya, berkeinginan menempatkan budaya dalam posisi dasar kerangka global pembangunan daerah Bali. Arwati (2006), Gelebet (1985), dan Jiwa Atmaja (2003) mengemukakan bahwa konsepsi-konsepsi ajaran agama Hindu yang melandasi tata ruang tradisional Bali, antara lain konsepsi

*Rwa bhineda*, konsepsi *Tri Hita Karana*, konsep *Tri Angga* dan *Tri Mandala*, konsepsi *Catuspatha*, konsepsi *Sanga Mandala*, dan konsepsi *Asta Kosala Kosali*. Konsepsi ini merupakan aspek kearifan lokal masyarakat adat Bali dalam upaya pemanfaatan ruang.

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan dan adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002). Seluruh kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib. Kearifan lokal dalam tulisan ini adalah suatu gagasan konseptual yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat dari yang sakral sampai profan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini wujud kearifan lokal adalah *Tri Hita Karana* sebagai konsep normatif yang mengandung makna keharmonisan dengan penempatan pemujaan pada zona utama (*parhyangan*), permukiman pada zona madya (*pawongan*), dan sawah, tegalan, kuburan pada zona nista (*palemahan*). *Tri Hita Karana*, selanjutnya disingkat dengan *THK*.

Dikukuhkannya *THK* sebagai landasan filosofi pembangunan Bali dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 memberi isyarat kepada seluruh komponen masyarakat Bali untuk menggunakan falsafah *THK* sebagai parameter dalam setiap beraktivitas. Dengan demikian lembaga tradisional seperti *desa adat* menentukan dalam upaya

pelestarian lingkungan fisik dan budaya yang dijadikan modal dasar dalam pengembangan, serta implementasi nilai budaya dengan prinsip THK merupakan landasan pokok dalam pemanfaatan ruang. Semua ini diupayakan agar tetap menarik bagi wisatawan.

Berdasarkan hasil analisis tim RTRWP Bali Tahun 2003, Singaraja dikategorikan sebagai kota sedang karena memiliki jumlah penduduk berkisar antara 100.000-500.000 jiwa. Memiliki perkembangan yang cukup pesat dengan daya tarik, seperti: wisata alam pantai, wisata budaya, dan kota pendidikan. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan pemilihan kota Singaraja sebagai daerah penelitian, di samping desa adat Buleleng di perkotaan Singaraja yang masih menerapkan aspek kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang berdasarkan budaya Bali, baik pada wilayah desa adat maupun pekarangan rumah masyarakat adat.

Kecenderungan pembangunan dewasa ini belum memperhatikan sepenuhnya pelestarian kekayaan sosial budaya sebagai bahan integral dari seluruh program pembangunan dan pemanfaatan ruang. Padahal konsep pembangunan yang berorientasi pada budaya tradisional Bali, harus memberikan ruang yang proporsional pada tiga unsur mendasar yakni *parhyangan, pawongan dan palemahan* sebagai pengejawantahan konsep THK. Dampak modernisasi dan penetrasi kebudayaan asing yang diserap tanpa saringan penghargaan terhadap kearifan lokal, membawa ke berubahnya cara hidup ke kehidupan yang serba materialistis dan bersifat konsumerisme. Berkembangnya lahan terbangun yang memanfaatkan lahan produktif, seperti lahan sawah dan tegalan (unsur *palemahan*) dijadikan kawasan permukiman dan pertokoan serta memanfaatkan ruang pekarangan rumah masyarakat

adat cenderung mulai meninggalkan konsepsi tata ruang tradisional Bali dan munculnya tata ruang baru yang berorientasi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) pemanfaatan ruang pada pekarangan rumah masyarakat adat di daerah perkotaan cenderung mulai meninggalkan konsep tata ruang berdasarkan budaya Bali dan di daerah perdesaan belum menerapkan konsepsi tata ruang tradisional secara utuh. Kenyataan ini, akan membawa kehancuran terhadap peradaban manusia dan kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dan (2) adanya kebijakan pemerintah menetapkan perkotaan Singaraja sebagai prioritas pusat pelayanan, permukiman, perdagangan dan jasa, sehingga terjadi kecenderungan mengkonversi lahan produktif menjadi lahan terbangun, secara langsung memicu menurunnya fungsi lindung. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: (a) mengetahui perbedaan penerapan aspek kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang wilayah desa dan pekarangan rumah masyarakat adat di daerah perkotaan dan perdesaan dan (b) mencari solusi pemanfaatan ruang desa adat dan pekarangan rumah masyarakat adat di daerah perkotaan dan perdesaan berbasis kearifan lokal?

## **METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei (Effendi dan Singarimbun, 1989). Survei, mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur, dengan cara ini dapat dicakup ciri demografis masyarakat perkotaan dengan sentuhan kekhasan yang dimiliki. Adanya keterbatasan metode survei dalam menggali informasi yang bersifat analisis kualitatif, maka dalam

penelitian didukung dengan metode observasi secara langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan informan kunci.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan mengambil dua lokasi yaitu lokasi perdesaan dan perkotaan. Responden penelitian adalah kepala keluarga. Jumlah responden adalah 145 Kepala Keluarga, yang sebarannya seperti Tabel 1.

Analisis dilakukan dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagaimana dianjurkan oleh Miles dan Huberman (1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang di daerah perkotaan dan perdesaan

Pola dasar *nyatur desa* pada *pempatan agung* merupakan pusat desa yang difungsikan sebagai ruang kosong untuk upacara-upacara *pecaruan*. Pola *pempatan agung* ini akan terjadi perulangan pola pada perencanaan jalan-jalan sub lingkungan *banjar*, pada *kabhyangan tiga* dan pada perumahan dengan pola *natab* yang terbentuk dari komposisi *bale-daja*, *bale-delod*, *bale-dangin* dan *bale-daub* yang membentuk ruang tengah yang kosong,

seperti tampak pada umumnya rumah-rumah di Bali (Tabel 2).

Berdasarkan Tabel 2 dan hasil observasi lapangan dapat diketahui bahwa tata letak unsur ruang wilayah desa di kedua *lansekap* mencapai 66,67% dari 20 aspek tata letak yang masih tetap. Sementara itu, tata letak di *lansekap* perdesaan mencapai 70%, dari 8 aspek tata letak ruang lebih baik dibandingkan dengan perkotaan yang hanya mencapai 30%. Struktur pemanfaatan ruang daerah perdesaan, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa berdasarkan tata ruang wilayah dibagi ke dalam tiga zona yaitu: (1) *utama mandala* yaitu ruang yang dimanfaatkan untuk kawasan suci yang mempunyai nilai sakral seperti *pura desa* dan *pura puseh*; (2) *madya mandala*, yaitu ruang yang mempunyai nilai sedang, dimanfaatkan untuk aktivitas manusia berwujud permukiman, wantilan, *bale banjar*, pasar desa, alun-alun dan *catuspatha*; (3) *nista mandala*, yaitu ruang dengan nilai *profan*, dimanfaatkan untuk kuburan, sawah, tegalan, dan *bengang*.

Selanjutnya, berdasarkan data survei dan observasi lapangan terungkap bahwa, tata letak ruang pekarangan rumah pada zona *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* tergolong sangat tinggi, sebarannya untuk

Tabel 1. Sebaran Desa dan Sampel KK Di daerah Penelitian

| No            | Fisiografis | Kota/Desa     | Jumlah KK    | Sampel KK  |
|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 1             | Perkotaan   | Kaliuntu      | 678          | 34         |
|               |             | Kampung Anyar | 57           | 28         |
|               |             | Liligundi     | 398          | 20         |
| 2             | Perdesaan   | Alasanger     | 619          | 31         |
|               |             | Tukadmungga   | 639          | 32         |
| <b>Jumlah</b> |             |               | <b>2.910</b> | <b>145</b> |

Sumber: analisis data sekunder 2009

daerah perdesaan mencapai 88,88% dari 63 responden dan perkotaan mencapai 82,92% dari 82 responden. Rata-rata keseluruhannya mencapai 85,51% dari 145 responden. Namun, zona *palemahan* di daerah perdesaan, pada komponen kamar mandi/WC, tata letak ruang menunjukkan 79,31% sementara perkotaan mencapai 100%. Secara rinci tata letak ruang pekarangan rumah di daerah penelitian disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dan hasil observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa tata letak unsur-unsur ruang pada zona *parhyangan* berupa *merajan*, *pelinggih surya*, dan *penunggun karang* dari responden di daerah penelitian sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan normatif konsep THK (Rata-rata 99,31%). Namun, ada beberapa responden yang menempatkan *sanggah/merajan* di lantai atas. Pada zona *palemahan*, tata letak kamar mandi/WC dan *tebe* menunjukkan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan normatif yang

ada. Namun, ada responden yang menempatkan kamar mandi di *bale daja*, setelah dikonfirmasi mereka menyatakan karena keterbatasan lahan.

### Solusi pemanfaatan ruang berbasis kearifan lokal di daerah perkotaan dan perdesaan

Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan mempertahankan dan merawat unsur-unsur ruang pada wilayah adat, serta adanya pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadinya keharmonisan. Unsur-unsur ruang pada wilayah desa berdasarkan kearifan lokal, pada zona *parhyangan* terdapat *kahyangan tiga*, yaitu pura desa, pura dalem yang keberadaannya sudah sesuai dengan konsepsi tata ruang tradisional Bali yang harus dilestarikan.

Berkaitan dengan penguatan kelembagaan adat perlu dibentuk forum komunikasi yang secara khusus membidangi pemanfaatan ruang pada wilayah desa adat yang

Tabel 2. Penerapan Kearifan Lokal pada Aspek Tata Letak Ruang Wilayah Desa

| Komponen Perubahan Penerapan THK |                                  | Lanskap       |               |            |            | Jumlah        |               |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                                  |                                  | Perkotaan     |               | Perdesaan  |            |               |               |
| THK                              | Indikator                        | Tetap         | Benubah       | Tetap      | Benubah    | Tetap         | Benubah       |
| Unsur <i>Parhyangan</i>          | <i>Pt. Desa</i>                  | √             |               | √          |            | 2             | 0             |
|                                  | <i>Pt. Paseh</i>                 | √             |               | √          |            | 2             | 0             |
|                                  | <i>Pt. Dalem</i>                 | √             |               | √          |            | 2             | 0             |
| Unsur <i>Pawongan</i>            | Pemukimran                       |               | √             |            | √          | 0             | 2             |
|                                  | Wartilan                         | -             | -             |            | √          | 0             | 1             |
|                                  | <i>Eale Banjar</i>               | √             |               | √          |            | 2             | 0             |
|                                  | Pasar                            |               | √             |            | √          | 0             | 2             |
|                                  | Ahun-alun                        |               | √             | √          |            | 1             | 1             |
|                                  | <i>Cataspathe</i>                | -             | -             | √          |            | 1             | 0             |
| Unsur <i>Palemahan</i>           | Kuburan, sawah, Tegalan, Bengang | √             |               | √          |            | 2             | 0             |
| <b>Jumlah</b>                    |                                  | <b>5</b>      | <b>3</b>      | <b>7</b>   | <b>3</b>   | <b>12</b>     | <b>5</b>      |
|                                  |                                  | <b>62,50%</b> | <b>37,50%</b> | <b>70%</b> | <b>30%</b> | <b>66,67%</b> | <b>33,33%</b> |

Sumber: analisis data sekunder 2009

Tabel 3. Penerapan Kearifan Lokal pada Aspek Tata Letak Ruang Pada Pekarangan Rumah

| THK                 | Indikator             | Perdesaan |       |         |       |     |     | Lansekap |       |         |       |      |     | Total |       |         |       |      |      |     |     |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|-------|-----|-----|----------|-------|---------|-------|------|-----|-------|-------|---------|-------|------|------|-----|-----|
|                     |                       | Tetap     |       | Berubah |       | Jml |     | Tetap    |       | Berubah |       | Jml  |     | Tetap |       | Berubah |       | Jml  |      |     |     |
|                     |                       | F         | %     | F       | %     | F   | %   | F        | %     | F       | %     | F    | %   | F     | %     | F       | %     | F    | %    |     |     |
| Komponen lingkungan | <i>Sanggah</i>        | 60        | 95,23 | 3       | 4,77  | 63  | 100 | 82       | 100   | 82      | 100   | 0    | 0   | 82    | 100   | 142     | 99,30 | 3    | 0,70 | 145 | 100 |
|                     | <i>Pelipis Sareng</i> | 63        | 100   | 0       | 0     | 63  | 100 | 82       | 100   | 82      | 100   | 0    | 0   | 82    | 100   | 145     | 100   | 0    | 0    | 145 | 100 |
|                     | <i>Pang Kandang</i>   | 63        | 100   | 0       | 0     | 63  | 100 | 82       | 100   | 82      | 100   | 0    | 0   | 82    | 100   | 145     | 100   | 0    | 0    | 145 | 100 |
|                     | <b>Jumlah</b>         | 186       | 98,41 | 3       | 1,59  | 189 | 300 | 246      | 300   | 246     | 300   | 0    | 0   | 246   | 300   | 432     | 299,3 | 3    | 0,70 | 445 | 300 |
|                     | <b>Rata-rata</b>      | 62        | 98,41 | 1       | 1,59  | 63  | 100 | 82       | 100   | 82      | 100   | 0    | 0   | 82    | 100   | 144     | 99,31 | 1    | 0,69 | 145 | 100 |
|                     | <i>Baite Dajaja</i>   | 40        | 63,49 | 23      | 36,51 | 63  | 100 | 60       | 73,17 | 22      | 26,83 | 82   | 100 | 100   | 68,96 | 45      | 31,04 | 145  | 100  |     |     |
|                     | <i>Baite Dandang</i>  | 55        | 87,30 | 8       | 12,70 | 63  | 100 | 78       | 95,12 | 4       | 4,88  | 82   | 100 | 133   | 91,72 | 12      | 8,28  | 145  | 100  |     |     |
|                     | <i>Baite Dawab</i>    | 58        | 92,06 | 5       | 7,94  | 63  | 100 | 58       | 70,73 | 24      | 29,27 | 82   | 100 | 116   | 80,00 | 29      | 20,00 | 145  | 100  |     |     |
|                     | <i>Baite Dridat</i>   | 59        | 93,65 | 6       | 6,35  | 63  | 100 | 60       | 73,17 | 22      | 26,83 | 82   | 100 | 119   | 82,06 | 26      | 17,94 | 145  | 100  |     |     |
|                     | <i>Pawonggan</i>      | 63        | 100   | 0       | 0     | 63  | 100 | 82       | 100   | 82      | 100   | 0    | 0   | 82    | 100   | 145     | 100   | 0    | 0    | 145 | 100 |
| Komponen Perkotaan  | <i>Picos</i>          | 63        | 100   | 0       | 0     | 63  | 100 | 82       | 100   | 82      | 100   | 0    | 0   | 82    | 100   | 145     | 100   | 0    | 0    | 145 | 100 |
|                     | <i>Jenang</i>         | 40        | 63,49 | 23      | 36,51 | 63  | 100 | 5        | 4,88  | 78      | 95,12 | 82   | 100 | 45    | 31,03 | 100     | 68,97 | 145  | 100  |     |     |
|                     | <b>Jumlah</b>         | 376       | 85,27 | 65      | 14,73 | 441 | 700 | 424      | 73,86 | 150     | 26,14 | 574  | 700 | 803   | 79,11 | 212     | 20,89 | 1015 | 700  |     |     |
|                     | <b>Rata-rata</b>      | 54        | 85,71 | 9       | 14,29 | 63  | 100 | 61       | 74,39 | 21      | 25,61 | 82   | 100 | 115   | 79,31 | 30      | 20,69 | 145  | 100  |     |     |
|                     | <i>K. Mandi/ WWC</i>  | 50        | 79,36 | 13      | 20,64 | 63  | 100 | 82       | 100   | 0       | 0     | 82   | 100 | 132   | 91,03 | 13      | 8,97  | 145  | 100  |     |     |
|                     | <b>Jumlah</b>         | 50        | 79,36 | 13      | 20,64 | 63  | 100 | 82       | 100   | 0       | 0     | 82   | 100 | 132   | 91,03 | 13      | 8,97  | 145  | 100  |     |     |
|                     | <b>Rata-rata</b>      | 50        | 79,36 | 13      | 20,64 | 63  | 100 | 82       | 100   | 0       | 0     | 82   | 100 | 132   | 91,03 | 13      | 8,97  | 145  | 100  |     |     |
|                     | <b>Jumlah Total</b>   | 612       | 81    | 693     | 1100  | 752 | 150 | 902      | 1367  | 228     | 1595  | 1100 |     |       |       |         |       |      |      |     |     |
|                     | <b>Rata-rata</b>      | 56        | 88,88 | 7       | 11,18 | 63  | 100 | 68       | 82,92 | 14      | 7,08  | 82   | 100 | 124   | 85,51 | 21      | 14,49 | 145  | 100  |     |     |

Sumber: analisis data sekunder 2009

beranggotakan golongan tua dan golongan muda dalam upaya memberikan kesempatan kepada lembaga adat berperanserta dalam pelestarian warisan budaya terutama dalam pemanfaatan ruang berdasarkan budaya Bali. Forum ini sebagai wahana bagi masyarakat lokal untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebelum merumuskan kebijakan tata ruang modern sebagai gagasan pemerintah.

Berkaitan dengan pembentukan pusat informasi, sebelum dapat menyusun rencana kegiatan untuk mendidik dan menyebarkan informasi mengenai pemanfaatan ruang wilayah berbasis kearifan lokal kepada *krama adat* dan anggota *sekeba teruna*, kemudian melaksanakan sosialisasi dan simulasi penerapannya dapat bekerjasama dengan PT dan pemerhati tata ruang Bali (LSM). Adanya peningkatan pemahaman masyarakat adat tentang pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan budaya Bali diharapkan dapat meningkatkan kesadaran budaya masyarakat untuk peduli pada lingkungan dan warisan budaya tentang pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal, serta mampu menerapkan dalam wilayah *desa adat* untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan serta dapat menjadi daya tarik pariwisata budaya.

### **Solusi Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal pada Pekarangan Rumah di Daerah Perkotaan dan Perdesaan**

Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan mempertahankan, menjaga dan merawat dengan baik unsur-unsur pada pekarangan rumah. Unsur ruang pada pekarangan rumah di daerah perkotaan berdasarkan kearifan lokal, pada zona *parhyangan* terdapat *merajan/sanggah*, *penunggun karang*, pada zona *pawongan* terdapat bangunan *meten*, sedangkan pada zona *palemahan* terdapat WC/Kamar mandi. Tata letak

bangunan dan fungsi pemanfaatan ruang pekarangan rumah sebagian masyarakat masih memegang teguh tata ruang tradisional dan memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan kearifan lokal. Namun pada sisi keterbatasan lahan menyebabkan masyarakat melakukan modifikasi dalam penempatan bangunan.

Semua unsur ruang pada pekarangan rumah pada zona *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* dipertahankan kelengkapannya dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dalam upaya menciptakan keharmonisan hubungan. Masyarakat masih meyakini akan adanya kesakitan pada anggota keluarga di dalam pekarangan rumah apabila tidak menerapkan tata ruang tradisional yang benar, demikian sebaliknya akan mendapatkan ketenangan bila menempatkan unsur-unsur ruang sesuai dengan fungsi dan berdasarkan petunjuk para *undagi*, *pemangku* sebagai orang yang ahli dalam tata ruang tradisional Bali.

Masyarakat perkotaan memiliki derajat pemahaman yang tinggi terhadap konsepsi tata ruang pada pekarangan rumah, tata letak unsur ruang dan fungsi ruang baik pada zona *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Pada sisi lain, masih ditemukan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsepsi tata ruang tradisional pada pekarangan rumah terutama konsepsi sanga mandala dan asta kosala-kosali. Kondisi ini perlu disikapi dengan membentuk suatu pusat informasi pemanfaatan pekarangan rumah berbasis kearifan lokal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan lembaga adat.

Tata letak unsur *parhyangan*, seperti *pura puseb* dan *pura desa* berada pada posisi *utama mandala*, namun *pura dalem* berada pada posisi *nista mandala (teben)*. Keberadaan *pura dalem* tersebut sudah ada sejak dahulu sebagai warisan leluhur, mengenai posisinya dinyatakan sudah tepat karena *pura dalem* posisinya harus dekat

dengan kuburan dan bukan berarti *pura dalem* menempati posisi dengan nilai profan, melainkan menurut *bendesa adat* di semua desa penelitian bahwa seluruh wilayah Bali memiliki nilai sakral dan penempatan *pura dalem* berada pada posisi utama yaitu *utama-ning nista*.

Pemanfaatan ruang desa dapat dimaknai bahwa, zona *utama mandala* berada pada posisi atas (utara), merupakan ruang dengan nilai sakral dimanfaatkan sebagai kawasan suci terdapat *pura puseh* dan *pura desa*, sedangkan zona *madya mandala* atau ruang yang mempunyai nilai sedang berada di bagian tengah. Pada zona ini terdapat permukiman, *bale banjar*, sedangkan zone *nista mandala* yang memiliki nilai profan berada pada posisi paling bawah (selatan), pada zone *nista mandala* dimanfaatkan untuk kuburan, *pura dalem*, sawah dan tegalan. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa struktur pemanfaatan tata ruang desa sesuai dengan tata ruang tradisional Bali, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat adat mempunyai kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam menempatkan fasilitas ruang berdasarkan ketentuan yang ada berdasarkan THK, seperti yang ditunjukkan oleh Edi (2007) dalam penelitian tata ruang tradisional Bali.

Pada zona *madya mandala*, merupakan letak bangunan *bale banjar*. Bangunan *bale banjar* dilengkapi juga dengan pemujaan *banjar*. Di sebagian daerah perkotaan pemujaan ditempatkan pada lantai atas. Menurut informasi yang diberikan oleh *kelihan banjar*, penempatan pemujaan pada lantai atas tidak bertentangan dengan konsep THK, karena adanya konsepsi *menek tuun* (atas-bawah), yang mana arah *menek* merupakan arah *utama*. Pada daerah perdesaan, tata letak unsur ruang pada zone *parhyangan* seluruhnya sudah sesuai dengan ketentuan normatif yang ada. Selanjutnya,

letak unsur *pawongan* sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi ada beberapa responden yang menempatkan *bale delod* di arah tenggara, *bale daja* di arah barat. Setelah dikonfirmasi terhadap pemilik mereka mengakui bahwa posisi penempatan bangunan tersebut tidak sesuai karena bangunan tersebut merupakan warisan dari orang tua, mereka tidak berani merubah tata letak dan dikatakan telah sesuai dengan petunjuk *undagi*, sedangkan tata letak zone *palemahan* menunjukkan tata letak yang sudah sesuai yaitu berada di posisi *nista mandala* yang berorientasi ke arah barat dan selatan yang memiliki nilai *profan*.

Penerapan konsep normatif THK pada aspek tata ruang permukiman di perdesaan dalam lingkungan permukiman perdesaan masih sesuai dengan ketentuan normatif THK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kuat mengikuti ketentuan normatif yang ada. Kuatnya masyarakat dalam menerapkan ketentuan tersebut disebabkan karena keyakinan dan adanya tradisi dalam kegiatan adat yang berhubungan dengan bangunan rumah dengan fungsinya masing-masing. Masyarakat tidak berani merubahnya, mereka khawatir akan musibah yang menimpanya, bilamana melakukan perubahan-perubahan. Namun, ditemukan perubahan berupa *bale daub* dimodifikasi menjadi warung karena aksesibilitas dan peluang ekonomi. Keadaan seperti ini juga ditunjukkan oleh Wesnawa (2009) dalam penelitian tentang perubahan penerapan konsep *Tri Hita Karana* dalam lingkungan permukiman perdesaan; kasus Kabupaten Badung Provinsi Bali.

Sejalan dengan wilayah perkotaan menjadi pusat permukiman, perlu adanya penetapan zonasi kawasan suci (*parhyangan*) agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan



ruang. Berkaitan dengan zona kawasan suci PHDI telah mengeluarkan *bhisama* mengenai radius kesucian tempat suci, dinyatakan bahwa tempat suci yang dimaksud adalah suatu tempat yang berwujud bangunan suci umat Hindu salah satunya adalah *kahyangan tiga*. Untuk radius kesucian *kahyangan tiga*, yaitu *apenyengker* (50m), sehingga apabila pemerintah merencanakan proyek pembangunan, agar penerapannya tidak melanggar kesucian pura tersebut.

Solusi dalam pemanfaatan ruang berupa upaya pelestarian unsur ruang pada zona *pawongan* perlu adanya pengawasan pelaksanaan fungsi agar dimanfaatkan sesuai dengan konsepsi yang telah berlaku untuk menghindari adanya penyalahgunaan pemanfaatan fungsi ruang, sedangkan pada zona *palemahan* terdapat kuburan yang keberadaannya telah sesuai dengan konsepsi tata ruang Bali. Namun, untuk ruang terbuka sebagai unsur *palemahan* telah berubah fungsi menjadi lahan terbangun, berkaitan kondisi ini pemerintah telah menyediakan ruang terbuka hijau dalam menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungannya.

Desa adat di Kecamatan Buleleng menjadi tumpuan dan harapan menjaga kelestarian alam Buleleng, khususnya yang berkaitan dengan kearifan lokal. Berkaitan dengan penguatan kelembagaan adat perlu dibentuk forum komunikasi yang secara khusus membidangi pemanfaatan ruang pada wilayah *desa adat* yang beranggotakan golongan tua dan golongan muda dalam upaya memberikan kesempatan kepada lembaga adat berperan serta dalam pelestarian warisan budaya terutama dalam pemanfaatan ruang berdasarkan budaya Bali. Forum ini sebagai wahana bagi masyarakat lokal untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah

sebelum merumuskan kebijakan tata ruang modern sebagai gagasan pemerintah.

Sebagian besar masyarakat adat di daerah perdesaan mempunyai derajat pemahaman yang relatif tinggi terhadap konsepsi tata ruang tradisional dan tata letak unsur-unsur ruang, baik pada *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Pada sisi lain masih ditemukan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsepsi tata ruang tradisional pada wilayah desa adat. Kondisi ini perlu disikapi dengan membentuk sebuah pusat informasi pemanfaatan ruang wilayah desa berbasis kearifan lokal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, seperti Badan Informasi dan Komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan perencana daerah dan sebagainya bekerjasama dengan lembaga adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat perbedaan aspek kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang wilayah desa dan pekarangan rumah masyarakat adat di daerah perkotaan dan perdesaan. Tata letak unsur ruang wilayah *desa adat* di perkotaan dan perdesaan belum sepenuhnya menerapkan konsepsi tata ruang tradisional Bali. Tata letak unsur pekarangan rumah di perdesaan lebih sesuai daripada daerah perkotaan. Secara umum komitmen masyarakat adat di daerah perkotaan dan perdesaan relatif tinggi dalam penerapan secara nyata konsepsi tata ruang tradisional Bali pada wilayah *desa adat* dan pekarangan rumah. Hal ini disebabkan adanya kesadaran budaya masyarakat dan kecintaannya terhadap warisan budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hanya sebagian kecil masyarakat adat yang tidak sesuai dalam menerapkan konsepsi tata ruang tradisional Bali pada pekarangan

rumah, karena kurangnya pemahaman dan keterbatasan lahan.

Solusi pemanfaatan ruang wilayah *desa adat* dapat dilakukan dengan upaya pelestarian, penguatan kelembagaan adat dan informasi pemanfaatan ruang wilayah *desa adat*. Solusi pemanfaatan ruang pekarangan rumah dapat dilakukan dengan upaya pelestarian dan informasi pemanfaatan pekarangan rumah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Hibah Penelitian Fundamental Tahun 2009, yang telah memberikan bantuan dana, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Demikian juga mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu dalam pengumpulan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, N. M. S. (2006) *Membangun Perumahan Umat*. Hindu: Denpasar
- Covarubias, M. (1972) *Island of Bali*. Oxford University Press: Oxford.
- Edi, N. A. M. (2007) Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal (Kasus Kelurahan Ubung Kota Denpasar dan desa Tulamben Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Gelebet, I. N. (1991) Tata Ruang Berdasarkan Kebudayaan Tradisional Bali, *Makalah Lokakarya University Consortium of the Environment tanggal 25 Juni 1991*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Jiwa, A. (2003) *Pempatan Agung dalam Perempatan Agung Mengungkap Konsepsi Pemanahan Ruang dan Waktu Masyarakat Bali*, Denpasar: CV Bali Media.
- Kusnadi (2006) Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Hukum. *Makalah dalam Serasehan Nasional Kearifan Lingkungan tanggal 27 September 2006*, Yogyakarta.
- Keraf, A. S. (2002) Etika Lingkungan, *Kompas*.
- Miles, M., Huberman, A., Michael (1992) *Analisis data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Muta'ali, L. (2005) Pengembangan Wilayah dan Penataan ruang di Indonesia: Tinjauan teoritis dan Praktis Bahan Kuliah PPW, Yogyakarta :PPS UGM.
- Setiawan, B. (1993) Urban growth. Land and Housing Problem in Denpasar, The Local Gouverment Role, *Thesis*, Canada: Waterloo University.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1995) *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES.

- Surpha IW. 2004. *Eksistensi Desa Adat Bali dengan Diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah*. Upada Sastra: Denpasar.
- Wesnawa IGA. 2009. Perubahan Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Lingkungan Permukiman Perdesaan: Kasus Kabupaten Badung Provinsi Bli. *Disertasi*. Fakultas pascasarjana UGM: Yogyakarta.
- Worosuprodjo S. 2001, *Ekologi Bentanglahan*. UGM: Yogyakarta.
- Yunus HS. 2004. Pendekatan Utama Geografi Acuan Khusus pada Pendekatan Keruangan, Ekologi dan Kompleks Wilayah. *Makalah dalam Studium General Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tanggal 24 Maret 2004*, (Tanpa Penerbit), Yogyakarta.